

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Sebrianus dkk. (2023-2024)

Penelitian berjudul “*Makna Sosial Budaya dan Nilai Olahraga dalam Tradisi Nariuk di Desa Pulau Patai*” yang diteliti oleh Sebrianus dkk pada tahun 2023-2024 bahwa penelitian ini membahas mengenai Tradisi Nariuk sebagai bagian dari kehidupan sosial Budaya Masyarakat Tradisi ini merupakan kegiatan menangkap ikan secara Bersama-sama menggunakan tombak atau tariuk yang dilakukan pada saat Sungai atau rawa pada musim kemarau oleh Masyarakat Desa Pulau Patai, dipandang sebagai praktik Budaya yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan atau diukur hanya melalui data kuantitatif atau statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif untuk menggali makna tradisi berdasarkan pengalaman langsung dari pandangan dari masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat Desa, dan pelaku Tradisi atau Masyarakat, serta menganalisis data desa dan dokumentasi dari media lokal selama periode oktober 2023 hingga februari 2024. Hasil ini menunjukkan nilai fisik dan rekreatif melainkan makna sosial budaya juga tradisi ini berperan penting dalam memperkuat gotong royong, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya lokal. Pemerintahan desa dengan Masyarakat memiliki peran yang penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi, meskipun masih di dalam hambatan dan keterbatasan dokumentasi dan perubahan gaya hidup Masyarakat

yang ada. Perbandingan dengan penelitian ini, kedua-duanya memiliki kesamaan yaitu tempat penelitian yang sama yaitu di Desa Pulau Patai yang berfokus terhadap potensi budaya lokal sebagai modal Pembangunan wisata, namun perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis dan tujuan penelitian. Sebrianus dkk meneliti bagaimana sisi makna sosial budaya sedangkan penelitian ini memandangnya sebagai bagian dari strategi kepala desa dalam menghidupkan Kembali wisata setelah mengalami penurunan.

2. Bayu Satrya Husodo (Tesis, 2023)

Penelitian ini berjudul “Analisis Perencanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diteliti oleh Bayu Satrya Husodo yang menganalisis menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif di Tingkat desa, focus kajian diarahkan pada dinamika perencanaan program, khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat serta dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan STBM. Penelitian ini dilaksanakan pada awal februari 2023 dengan melibatkan berbagai informan, antara lain pemerintahan desa, kader Kesehatan, pelaksana STBM, serta pihak Dinas Kesehatan Barito Timur. Analisis ini menggunakan Milles dan Huberman (1994) yang meliputi beberapa tahap yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan program STBM ditentukan oleh proses musyawarah antar pemangku kepentingan dan Tingkat keterlibatan Masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi kebijakan desa dan peran aktif kader, sementara hambatan muncul akibat keterbatasan anggaran serta rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap sanitasi. Program STBM dinilai relative berhasil pada pilar

stop BABS, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan sampah dan air limbah. Perbedaannya terletak pada orientasi tujuan, penelitian Husodo lebih berfokus pada pelaksanaan program Pembangunan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada Strategi Kepala Desa dalam sektor pariwisata, namun secara konseptual penelitian Husodo memperkuat landasan bahwa Pembangunan desa termasuk pariwisata tidak akan berhasil tanpa adanya partisipan aktif masyarakat dan pemimpin.

3. Annisa, A.P. (2024)

Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Desa Wisata dalam Meningkatkan Kunjungan Pasca-Pandemi COVID-19” Penelitian ini dilakukan oleh Anissa yang menganalisis strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan desa wisata untuk menarik wisatawan pasca penurunan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini mendalami praktik promosi atau pemasaran dan strategi komunikasi pengelola desa wisata. Data diperoleh melalui beberapa tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola, pelaku usaha, aparat desa dan wisatawan yang ada pada tempat wisata desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial sarana utama dalam pemasaran yang berguna untuk promosi lokal dan kerja sama dengan pihak swasta. Kunci dari kreativitas dan dukungan Masyarakat lah menjadi faktor keberhasilan dan menjadi hambatannya Adalah hambatan dana serta minim kemampuan dalam media digital menjadi kendala yang perlu diatasi. Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung karena keduanya membahas tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata,

sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Anissa menitik beratkan pada aspek komunikasi pemasaran atau promosi dan penelitian ini menyoroit bagaimana peran kepala desa sebagai penggerak utama untuk strategi meningkatkan wisata yang mengalami penurunan.

4. Rosalina et al. (2023)

Penelitian ini berjudul “Pengelola dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komputer: Studi Kasus di Desa Penglipuran dan Desa Taro, Bali” penelitian ini dilakukan oleh Rosalina et al. dan tim menganalisis bagaimana pengelolaan desa wisata berbasis kelompok di dua desa wisata yang ada di Bali, melalui pendekatan Kualitatif Deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa model *Community-Based Tourism* (CBT) yang diterapkan berbeda tiap desa seperti desa Penglipuran menerapkan system pengelolaan yang terstruktur melalui Lembaga adat dengan pembagian hasil transparan untuk pemeliharaan dan Pembangunan desa sebaliknya desa Taro menerapkan model partisipatif di mana Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan wisata seperti pemanduan, homestay (penginapan/tempat istirahat), serta pertunjukkan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Penglipuran menerapkan bahwa desa menggunakan sistem pengelolaan yang terorganisasi melalui Lembaga adat dengan penghasilan yang dikelola secara transparan untuk keperluan kebersihan, pelestarian budaya, dan Pembangunan fasilitas umum sebaliknya, desa Taro mengembangkan model partisipatif dimana Masyarakat terlibat langsung dalam mengelola wisata tersebut sehingga pengelola disana Masyarakat secara bersama-sama mengelolanya dari kedua model ini menunjukkan bahwa partisipasi

Masyarakat dan peestarian nilai lokal berhasil. Penelitian ini memiliki kesamaan nilai dan arah pembangunan yang menekankan pentingnya pera Masyarakat dalam pengelolaan wisata namun penelitian Rosalina berfokus pada keberhasilan dua desa yang telah menjadi contoh nasional sedangkan, penelitian yang diteliti ini mengkaji desa yang sedang berupaya meningkatkan dari penurunan pada wisata di desa.

5. Miranda Dwi Setyaningrum dan Arimurti Kriswibowo (2023-2024)

Penelitian ini berjudul “Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Sekapuk dalam Pengembangan Desa Wisata” penelitian ini dilakukan oleh Miranda Dwi Setyaningrum dan Arimurti Kriswibowo bagaimana penelitian ini berfokus pada gaya kepemimpinan transformasional Kepala Desa Sekapuk dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan empat dimensi utama keteladanan, motivasi inspiratif, rangsangan intelektual, dan perhatian individu peneliti menemukan bahwa kepemimpinan transformasional mendorong partisipasi Masyarakat yang berinovasi untuk mengelola wisata, dampaknya terlihat pada peningkatan Profesionalisme BUMDes, berkembangnya usaha lokal serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan yang secara keseluruhan memperkuat Pembangunan wisata berkelanjutan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan ini meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong novasi dalam pengelolaan wisata serta memperkuat peran BUMDes dampaknya terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat, profesionalisasi pengelolaan wisata, berkembangnya usaha lokal seperti *homestay* (penginapan/tempat istirahat), serta koordinasi

antar pemangku kepentingan yang lebih baik, kepemimpinan transformasional terbukti mendukung Pembangunan desa wisata yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki kesamaan atau hubungan paling erat dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teori kepemimpinan transformasional sebagai landasan teori utama namun perbedaan mendasar terletak pada konteks dan arah penelitian jika penelitian Miranda Dwi Setyaningrum dan Arimurti Kriswibowo meneliti desa yang sudah berhasil mengembangkan wisata sebaliknya, penelitian ini justru meneliti strategi kepala desa dalam situasi penurunan wisata yang menuntut kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi lintas pihak.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan kebijakan, program, dan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga negara untuk mencapai tujuan bersama masyarakat dalam perspektif ilmu sosial dan administrasi public tidak hanya berkaitan dengan manajemen birokrasi dan efisiensi kerja aparatur tetapi juga mencakup komunikasi sosial, nilai dan makna yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan public. Menurut Woodrow Wilson (1887) administrasi publik adalah pelaksanaan praktis dari kebijakan negara yang bertujuan efisiensi dan profesionalisme dalam pemerintahan sementara itu menurut Dwight Waldo (1955) menekankan bahwa administrasi publik memiliki beberapa dimensi yakni nilai, moral, dan sosial, sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks

kemanusiaan dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya mempelajari apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat dalam proses penyelenggara pemerintahan dalam penelitian kualitatif teori administrasi publik digunakan untuk memahami makna, perilaku, serta dinamika sosial yang muncul dalam praktik pemerintahan. Administrasi publik ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana kepala desa ini menjalankan peran kepemimpinannya dalam mengelola potensi desa khususnya dibidang pengembangan sektor pariwisata yang ada di desa, untuk memahami lebih dalam mengenai peran kepala desa sebagai seorang pemimpin yang menggerakkan masyarakat maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori kepemimpinan transformasional. Administrasi Publik ini menggunakan pendekatan teori kepemimpinan transformasional menjelaskan bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya berperan sebagai pengambil Keputusan administratif tetapi sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memotivasi yang ikut berperan dalam mencapai tujuan bersama, konsep ini dikembangkan oleh Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio dalam karya mereka yang berjudul *“Transformasional Leadership (2006)”* menurut Bass dan Riggio kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mampu mengubah sikap, nilai, dan perilaku pengikut melalui inspirasi, motivasi, serta pemberdayaan individu. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada yang terjadi di desa Pulau Patai yang memerlukan strategi pengelolaan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Administrasi publik ini menggunakan administrasi baru yang dipakai oleh penelitian ini adalah rujukan dari Paradigma *New Public Management* yang menekankan efisiensi, kinerja, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil dalam konteks ini administrasi publik tidak hanya dilihat sebagai pengelolaan birokrasi itu sendiri tetapi sebagai sistem manajemen modern yang menggunakan praktik sektor wisata untuk meningkatkan pelayanan publik, *New Public Management* mendorong pemerintah agar lebih berinovatif, berorientasi pada hasil, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Selain *New Public Management* muncul juga paradigma *Governance* atau tata Kelola yang menekankan peran kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam Pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik. Paradigm aini menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas sosial artinya pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku utama yang menentukan kebijakan tetapi bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, paradigma *Governance* relevan dengan konteks Pembangunan modern di mana kompleksitas masalah publik membutuhkan strategi kolaboratif dan berbasis partisipasi.

3. Teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community-Based Tourism Development/CBT*)

Teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community-Based Tourism Development/CBT*) adalah pendekatan Pembangunan pariwisata yang

menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pengembangan destinasi/wisata, konsep ini muncul sebagai respon terhadap model pariwisata konvensional yang seringkali hanya menguntungkan investor atau pihak luar sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau tenaga kerja dengan manfaat ekonomi yang terbatas. Dalam *Community-Based Tourism Development* masyarakat tidak hanya menjadi objek Pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki hak untuk merencanakan, mengelola, serta menikmati hasil dari kegiatan pariwisata di wilayah tersebut. Menurut Rosalina et al. (2023) model *Community-Based Tourism Development* menempatkan masyarakat sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat utama dan aktivitas pariwisata artinya, masyarakat memiliki control yang lebih besar terhadap pengambilan Keputusan terkait pengelolaan destinasi wisata lokal, melalui partisipasi aktif, pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. *Community-Based Tourism Development* diharapkan mampu menciptakan model pariwisata yang lebih inklusif, adil, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah tujuan wisata jika diterapkan dengan baik, pendekatan ini dapat menjadi strategi efektif dalam Pembangunan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

4. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat adalah salah satu unsur fundamental dalam proses Pembangunan desa, konsep ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat Pembangunan tetapi sebagai pelaku utama yang terlibat secara aktif dalam setiap tahap Pembangunan. Dalam konteks

Pembangunan desa terutama dalam sektor pariwisata keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu program. Menurut Bayu Husodo (2023) keberhasilan program Pembangunan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh masyarakat bagaimana masyarakat ini dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hingga evaluasi program pada tahap perencanaan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki desa, melalui proses musyawarah desa atau forum diskusi masyarakat terdapat berbagai gagasan dan kepentingan dapat diakomodasi sehingga program Pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan Pembangunan dalam sektor pariwisata misalnya, masyarakat dapat berperan sebagai pengelola destinasi wisata, penyedia homestay (penginapan/tempat istirahat), pelaku usaha kuliner lokal, pemandu wisata, maupun pengrajin produk khas desa dengan keterlibatan tersebut masyarakat tidak hanya menjadi objek Pembangunan tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari program yang dijalankan. Sementara itu, pada tahap evaluasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menilai efektivitas dari program Pembangunan yang sudah dilaksanakan melalui evaluasi partisipatif masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kekurangan dan kendala pemerintahan desa dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan supaya program Pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

5. Teori Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Strategi Komunikasi Pemasaran adalah upaya menjembatani kesenjangan persepsi yang ditawarkan oleh pengelola destinasi saja tapi juga wisatawan akan merasakan pengalaman yang bisa dirasakan atau yang tidak di beli. Maka teori ini berfokus pada kepercayaan dan imajinasi. Pemasaran Pariwisata ini lebih efektif jika dikelola secara persepsi dan emosi yang bukan sekedar “tempat berjualan”. Strategi ini akan berhasil ketika apa yang dijanjikan dalam pemasaran atau promosi sesuai dengan yang dialami oleh wisatawan, sehingga memicu wisatawan untuk membagikan pengalaman positif mereka untuk masyarakat yang ingin berkunjung. Dalam strategi komunikasi pemasaran memegang peran penting karena melalui strategi komunikasi pemasaran ini dapat mempromosikan melalui beberapa promosi seperti media sosial, kegiatan promosi lokal, dan kerja sama dengan pelaku wisata sehingga strategi ini memperkuat citra destinasi dan menarik wisatawan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kreativitas promosi, dukungan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi.

6 Teori Pelestarian Budaya dan Potensi Lokal sebagai Daya Tarik Wisata

Pelestarian budaya dan pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata, khususnya pada wilayah pedesaan. Dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, budaya lokal dipandang sebagai aset yang memiliki nilai strategis dalam menciptakan daya tarik wisata yang unik dan berbeda dari daerah lain. Budaya yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat desa, seperti tradisi, adat istiadat, kesenian, serta nilai-nilai kearifan lokal, dapat menjadi sumber daya wisata yang bernilai tinggi apabila dikelola dengan baik. Menurut Sebranus dkk. (2023–2024), potensi budaya lokal seperti tradisi Nariuk di Desa Pulau Patai merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya. Tradisi Nariuk tidak hanya mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, tetapi juga menggambarkan identitas serta sejarah kehidupan masyarakat desa. Kegiatan tradisi tersebut biasanya melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif dan menjadi sarana mempererat hubungan sosial antarwarga. Oleh karena itu, selain memiliki nilai budaya, tradisi ini juga mengandung nilai edukatif yang dapat diperkenalkan kepada wisatawan. Dalam perspektif teori pelestarian budaya, berbagai kegiatan adat dan tradisi lokal dipandang sebagai warisan budaya (*cultural heritage*) yang perlu dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian budaya tidak hanya bertujuan mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan pariwisata. Melalui pengembangan wisata budaya, tradisi-tradisi lokal yang sebelumnya hanya dilaksanakan dalam lingkup masyarakat dapat diperkenalkan kepada wisatawan sebagai bentuk atraksi wisata yang autentik. Pengembangan potensi budaya sebagai daya tarik wisata juga berkaitan dengan konsep kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, serta praktik kehidupan yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut

biasanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan sosial dalam masyarakat, serta aturan adat yang mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks pariwisata, kearifan lokal dapat menjadi ciri khas yang memberikan pengalaman unik bagi wisatawan karena tidak dapat ditemukan di tempat lain. Namun pengembangan budaya lokal sebagai atraksi wisata perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan makna asli dari tradisi tersebut. Salah satu tantangan dalam pengembangan wisata budaya adalah risiko terjadinya komersialisasi budaya, yaitu ketika tradisi hanya dijadikan sebagai tontonan wisata tanpa memperhatikan nilai-nilai sakral dan makna sosial yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu dalam teori pelestarian budaya, pengelolaan tradisi sebagai daya tarik wisata harus tetap menjaga keaslian, nilai, serta norma budaya yang berlaku dalam masyarakat. Peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pelestarian budaya tersebut. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, seperti memasukkan kegiatan budaya ke dalam agenda desa, memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan adat, serta mempromosikan potensi budaya sebagai bagian dari pengembangan desa wisata. Selain itu, masyarakat sebagai pemilik budaya memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut agar tetap dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Pelestarian budaya juga dapat didukung melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, pelatihan kesenian, serta dokumentasi tradisi lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keberadaan

budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa. Dengan adanya promosi yang tepat, potensi budaya lokal seperti tradisi Nariuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat luar dan menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain memberikan nilai budaya, pengembangan wisata berbasis potensi lokal juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Kegiatan wisata budaya dapat membuka peluang usaha baru, seperti penjualan produk kerajinan lokal, kuliner tradisional, jasa pemandu wisata, hingga penyediaan homestay bagi wisatawan. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga identitas masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Secara keseluruhan teori pelestarian budaya dan potensi lokal sebagai daya tarik wisata menekankan bahwa budaya lokal merupakan aset penting yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Melalui dukungan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, serta pengelolaan yang berkelanjutan, tradisi dan kearifan lokal dapat menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat desa.

7. Konsep *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa (UNDP, 1997)

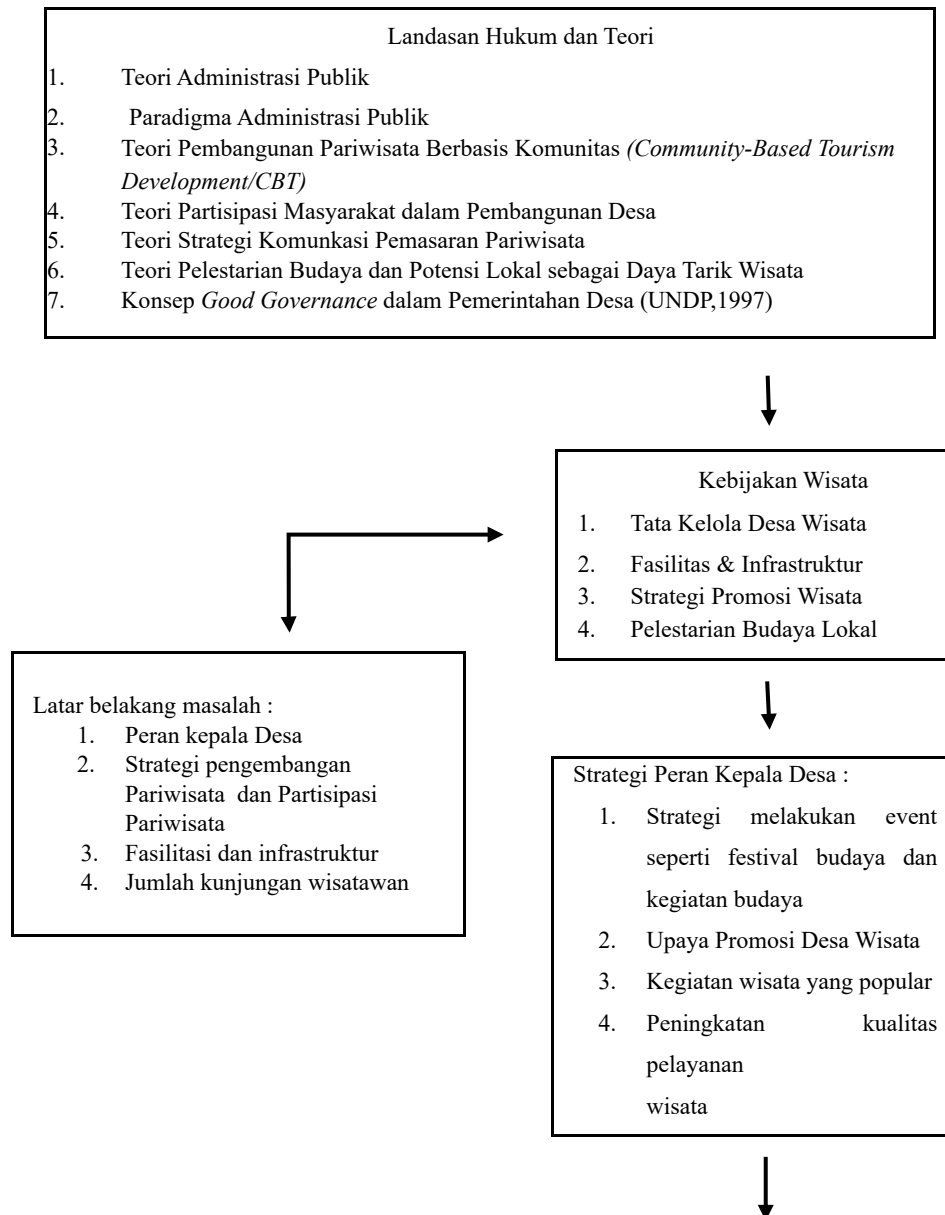
Konsep *Good Governance* dalam pemerintahan desa merujuk pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini banyak dikembangkan oleh United Nations Development

Programme (UNDP) pada tahun 1997 sebagai kerangka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan good governance berarti bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program Pembangunan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan, program, serta pengelolaan anggaran desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain transparansi, prinsip partisipasi juga menjadi unsur penting dalam good governance. Masyarakat desa diberi ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui forum musyawarah desa atau kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan adanya partisipasi tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Good governance juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan penegakan hukum. Aparatur desa harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya yang dikelola. Seluruh tindakan pemerintahan harus berlandaskan

pada peraturan yang berlaku sehingga tercipta tata kelola yang adil dan tertib. Di samping itu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya desa menjadi faktor penting agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, konsep good governance menurut UNDP (1997) menekankan bahwa pemerintahan desa harus dikelola melalui prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan.

C. Kerangka Konseptual

Gambar : 2.1 Kerangka Konseptual



Strategi Kepala Desa dalam meningkatkan
kunjungan wisata di Desa Pulau Patai
sudah cukup optimal

Sumber : Peneliti 2026